

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah dibentuk sebagai upaya pemerintah pusat untuk memberikan keleluasaan kepada daerah-daerah di Indonesia untuk mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri. Namun otonomi daerah sekalipun ternyata juga tidak terlalu membawa dampak besar di dalam pembangunan di beberapa daerah. Di wilayah Riau misalnya sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi, pembangunan khususnya di bidang infrastruktur terasa cukup lambat. Fenomena seperti terhentinya pembangunan Jembatan Siak IV yang sudah direncanakan sejak tahun 2009 tidak mendapatkan tanggapan bahkan hingga tahun 2016. Penanganan pemerintah terhadap jalan-jalan provinsi juga masih dinilai kurang baik.

Dalam persoalan ini tentunya ada banyak dinamika politik yang menyertai didalam proses pembangunan infrastruktur Jembatan Siak IV maupun jalan-jalan provinsi Riau tersebut. Dinamika-dinamika tersebut juga berperan dalam proses pembangunan. Studi ini memfokuskan pada dinamika politik yang terdapat dalam proses perancangan infrastruktur di provinsi Riau, mengenai hal-hal apa saja kendala yang dapat dilihat dibalik proses pembangunan infrastuktur khususnya mengenai Jembatan Siak IV dan pembangunan serta perawatan jalan provinsi Riau.

Kata kunci: Infrastuktur, Pembangunan, Dinamika Politik

